

EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MENENGAH KEJURUAN (Studi Komparatif pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten)

Dani Rahman Hakim

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
email: danirahmanhak@gmail.com

Dadang Suhendar

Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan

APA Citation: Hakim, D. R. & Suhendar, D. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah Kejuruan. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 17(1), 11-23. DOI: 10.25134/equi.v17i01.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the process of managing school aid funds (BOS) at SMK Negeri 3 Tangerang Selatan and SMK Assalam Jayanti, Tangerang City. This study uses qualitative methods with the concept of case studies. Data collection method is done by triangulation and documentation. Data analysis was performed descriptively qualitatively using Miles and Huberman's approach. The results of this study indicate that the management of School Operational Assistance (BOS) funds in SMKs that are sampled tend to be good and in accordance with BOS Technical Guidelines but still need to undergo improvements. Although the sample has different characteristics, the constraints encountered in the process of managing BOS funds are relatively similar. The main obstacle in managing BOS funds relates to delays in disbursement, completeness of the files in the books, to the determination of the scale of priorities for the use of a relatively unplanned budget. It was also found that the management of BOS budget funds conducted by state SMKs such as SMKN 3 South Tangerang tended to be more obedient to Technical Guidance, orderly administration, have competent management human resources, and apply the principles of transparency and better accountability. However, from the aspect of financial management innovation of private vocational schools such as Assalam Jayanti, the private sector has more determination to survive by seeking creative additional funding to cover the lack of BOS funds.

Keywords: BOS; reporting; and management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengelolaan dana bantuan sekolah (BOS) di SMK Negeri 3 Tangerang Selatan serta SMK Assalam Jayanti Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan konsep studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK yang dijadikan sampel cenderung sudah baik dan sesuai dengan Juknis BOS tetapi masih perlu mengalami perbaikan-perbaikan. Meskipun sampel memiliki karakteristik yang berbeda, namun kendala yang ditemui dalam proses pengelolaan dana BOS yang dilakukan relatif memiliki kesamaan. Kendala utama dari pengelolaan dana BOS berkaitan dengan keterlambatan pencairan, kelengkapan berkas dalam pembukuan, hingga penentuan skala prioritas penggunaan anggaran yang relatif belum terencana dengan baik. Ditemukan juga bahwa pengelolaan anggaran dana BOS yang dilakukan SMK negeri seperti SMKN 3 Tangsel cenderung lebih taat Juknis, tertib administrasi, memiliki SDM pengelolaan yang kompeten, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Namun demikian, dari aspek inovasi pengelolaan keuangan SMK swasta seperti

Assalam Jayanti swasta lebih memiliki tekad yang kuat untuk bertahan dengan mencari pendanaan-pendanaan tambahan yang kreatif dalam menutupi kekurangan dana BOS.

Kata Kunci : BOS; pelaporan; dan pengelolaan.

PENDAHULUAN

Meskipun sebagian besar prosesnya telah dilakukan secara online, namun permasalahan dalam pengelolaan dana BOS di SMK masih kerap terjadi. Pada tahun 2018 misalnya, Kepala SMK Kerabat Kita Brebes Provinsi Jawa Tengah beserta wakilnya harus ditahan karena menyelewengkan dana BOS selama 3 tahun berturut-turut dengan nilai hampir 2 miliar rupiah (Detik). Dari nilai ini, tidak semuanya digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan juga untuk membayar gaji honorer, pengadaan tanah, hingga membangun kelas baru yang secara aturan pengeluaran seperti ini tidak diperbolehkan.

Tidak hanya di Brebes, kasus-kasus penyalahgunaan dana BOS lain di SMK sudah banyak mencuat. Seakan tidak ada habisnya, Kemendikbud bahkan menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan indikasi penyalahgunaan dana penunjang sekolah bagi para siswa ini. Kasus penyalahgunaan dana BOS juga terjadi di Provinsi Banten. Di Kota Tangerang misalnya, dugaan penyalahgunaan masih kerap ditemukan. Utamanya di sekolah swasta yang bernaung di bawah yayasan. Mekanisme pengelolaan, penggunaan, serta pelaporan dana BOS di sekolah swasta cenderung sulit dilakukan. Bahkan, belakangan ini Kota Tangerang sedang dihebohkan dengan adanya pemecatan sepihak dari yayasan atas kepala sekolah SMP Arrahman karena mempertanyakan

dana BOS. Dalam pengakuannya, Kepsek yang dipecat yayasan tersebut mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS (Potret Tangerang).

Lebih rentannya sekolah swasta menyalahgunakan dana BOS diakui oleh Muhadjir Effendi semasa masih menjadi Menteri Pendidikan. Ia menyatakan bahwa ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab khususnya dari sekolah swasta yang ‘memanfaatkan’ dana BOS (Koran-Jakarta). Atas dasar itu, Kemendikbud mengklaim akan melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam realisasi dan pelaporan dana BOS di sekolah swasta.

Meskipun sekolah swasta tergolong lebih rentan, namun bukan berarti pengelolaan dana BOS di sekolah negeri sudah sempurna. Permasalahan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah negeri juga masih sering terjadi. Selain karena adanya niat koruptif, penyalahgunaan dana BOS pun dapat terjadi karena ketidaktahuan sekolah mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS yang baik dan benar. Meskipun sosialisasi sudah sering dilakukan, tetapi pada kenyataannya masih ditemukan sekolah yang laporan pengelolaan dana BOS nya masih keliru sehingga menjadi temuan auditor.

Kerentanan terjadinya penyelewengan atau kesalahan dalam pengelolaan dana BOS juga masih membayangi SMKN 3 Tangerang Selatan (Tangsel) dan SMK Assalam Jayanti Kota

Tangerang. SMKN 3 Tangsel menjadi salah satu SMK yang unggul dari segi kualitas pelaksanaan pendidikan hingga kompetensi lulusannya. Atas dasar itu, meneliti bagaimana pengelolaan keuangan sekolah dan dana BOS di sekolah ini menjadi sangat menarik. Sementara SMK Assalam Jayanti Tangerang, masih terbilang sekolah sederhana yang bertekad untuk terus berkembang. Kendala-kendala yang nantinya ditemukan dalam pengelolaan dana BOS di SMK ini juga menjadi bagian yang unik untuk diteliti. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi pengelolaan dana BOS di kedua sekolah tersebut untuk melihat apakah pengelolaan dana BOS yang terjadi di tingkat satuan pendidikan sudah benar-benar terstandar atautkah masih terkendala.

LANDASAN TEORITIS

a. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan sekolah mencakup proses perencanaan, perencanaan dan evaluasi atas pengalokasian biaya pendidikan yang diperlukan untuk belanja investasi maupun operasional sekolah. Dalam proses perencanaan, sekolah menuangkan segenap rencana pengeluaran dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

Tujuan utama pengelolaan keuangan dalam manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta meminimalisir penyalahgunaan (Sudrajat, 2010). Berdasarkan hal ini, pengelolaan keuangan sekolah memiliki konsep dasar yaitu transparansi, akuntabilitas,

efektivitas, dan efisiensi (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Transparansi mengacu pada kebebasan untuk mengakses segenap aktifitas politik maupun ekonomi pemerintahan beserta kebijakan-kebijakannya (Mardiasmo, 2006). Berdasarkan hal ini, transparansi membuat publik dapat mengakses informasi yang diinginkan terkait dengan pengelolaan keuangan maupun kinerja pemerintahan ataupun instansi lain yang menggunakan dana negara. Keberadaan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah termasuk dana BOS cenderung sangat penting. Menurut (Siswanto & Sutrisna, 2014), jika pembiayaan kegiatan pendidikan dan program kerja yang menggunakan dana BOS ditunjang dengan laporan pertanggungjawaban secara baku, disampaikan kepada publik dengan lisan maupun tulisan, serta terbuka terhadap pemeriksaan dari pihak terkait, maka pembiayaan yang menggunakan dana BOS dan pertanggungjawabannya dapat dipercaya.

Adapun akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban bagi pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatannya yang berkaitan dengan amanah yang diberikan (Mardiasmo, 2009). Mengacu pada pendapat ini, pengelolaan keuangan sekolah berarti harus dipertanggungjawabkan dengan baik melalui adanya publikasi.

Antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah maupun penyelenggara pemerintahan memiliki keterkaitan. Transparansi dan akuntabilitas bahkan terbukti signifikan mempengaruhi kinerja pemerintahan

(Suryo Pratolo, 2008). Atas dasar itu, dalam penyelenggaraan sekolah juga transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu ukuran penting untuk mewujudkan kinerja pengelolaan sekolahnya. Bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan sekolah antara lain dengan mempublikasikan informasi. Dalam konteks ini, informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dapat ditempel di berbagai tempat strategis sekolah agar para orangtua siswa, komite sekolah, pengawas, serta masyarakat dapat mengaksesnya. Semakin transparan dan semakin akuntabel pengelolaan keuangan sekolah menunjukkan kualitas pengelolaannya.

Tidak cukup dengan transparan dan akuntabel, pengelolaan keuangan sekolah juga harus mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dalam konteks ini bukan hanya mengacu pada waktu penyelesaian pekerjaan saja, melainkan juga pada kualitas pekerjaan tersebut yang harus sesuai dengan harapan (Hakim & Suhendar, 2019).

Efektivitas juga dapat dipahami tidak hanya sebagai pencapaian tujuan, melainkan juga pada kesesuaian kualitas hasil dengan visi lembaga. Atas dasar itu, efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah termasuk dana BOS berarti dapat tercapai ketika dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya serta dapat menghasilkan dampak yang baik bagi peningkatan kualitas sekolah.

Adapun efisiensi dipahami sebagai upaya meminimalisir penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efisiensi dana

keuangan sekolah berarti menggunakan dana dengan penghematan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Prinsip efisiensi ini diukur berdasarkan pendekatan kuantitatif. Sehingga semakin banyak hasil yang diperoleh, dengan penggunaan sumber daya yang semakin minimum, maka dapat dikatakan semakin efisien. Dalam penelitian (Solikhathun, 2015) dijelaskan bahwa terdapat 7 prinsip pengelolaan dana BOS. Antara lain, prinsip swakelola dan partisipatif, prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, prinsip tertib administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya. Ketujuh prinsip ini dapat diukur secara kuantitatif.

Pengelolaan dana BOS yang dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah juga merupakan konsekuensi dari adanya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam konteks ini, MBS memungkinkan kepala sekolah dan guru memiliki kewenangan luas untuk mengelola sekolah dengan tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah (Pratiwi, 2016). Proses pengelolaan sekolah tersebut dilakukan melalui kurikulum yang inklusif, proses belajar efektif, lingkungan yang mendukung, sumber daya berasaskan pemerataan, dan standarisasi dalam monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hal ini, terdapat 4 komponen dalam MBS yaitu manajemen, proses pembelajaran, sumber daya manusia, dan administrasi sekolah.

b. Mekanisme Pengelolaan Dana BOS

Mekanisme pengelolaan dana BOS diatur berdasarkan Peraturan Mendikbud tentang Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Dalam Juknis tersebut dijelaskan

bahwa pelaporan dana BOS dilakukan secara berjenjang, dari mulai tingkat satuan pendidikan, Kota/Kabupaten, Provinsi, hingga Pemerintah Pusat.

Pelaporan dana BOS tersebut, meliputi kegiatan-kegiatan berupa penyusunan RKAS, pembukuan, realisasi penggunaan dana, rekapitulasi penggunaan dana, dan penanganan pengaduan masyarakat. Keenam kegiatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, sehingga jika ada satu saja kegiatan yang tidak dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan Juknis.

Dalam penelitian (Silele & Sabijono, 2017) salah satu bentuk ketidaksesuaian pelaporan dana BOS adalah dari aspek transparansi yang dalam konteks ini, pihak sekolah harus membuat papan informasi terkait dengan penggunaan dana BOS. Selain itu, laporan eksternal khususnya yang berkaitan dengan *cash opname*, berita acara pemeriksaan kas, dan pembukuan dana BOS juga harus lengkap. Antara realisasi dana BOS dengan RAPBS (Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Sekolah) harus sesuai (Salman, Warjio, & Isnaini, 2018). RAPBS itu sendiri merupakan konsekuensi dari penggunaan dana BOS yang harus didasarkan pada konsensus dan keputusan antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Sekarang, istilah RAPBS diganti menjadi RKAS.

c. Kendala Umum Pengelolaan Dana BOS

Hasil penelitian (Fitri, 2019) menjelaskan bahwa hambatan penggunaan dana BOS di SMK se-Provinsi Aceh adalah terbatas pada kegiatan tertentu, adanya keterlambatan pencairan, bahkan

pencairan dana yang tidak selalu sesuai dengan jumlah siswa. Selain itu, dana BOS yang didapatkan juga cenderung masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan sekolah serta adanya pemahaman masyarakat bahwa BOS diberikan agar dapat sekolah gratis.

Hambatan-hambatan seperti ini mengakibatkan sekolah kurang leluasa dalam memaksimalkan anggaran BOS untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. Namun di sisi lain, adanya aturan yang relatif ketat ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan dana BOS itu sendiri.

Adapun dalam penelitian (Pontoh, Ilat, & Manossoh, 2017) dijelaskan bahwa terdapat 4 hambatan umum yang menjadi alasan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan dana BOS. Hambatan umum tersebut yakni hambatan pengawasan, sumber daya manusia, komunikasi, dan struktur birokrasi. Hambatan pengawasan diakibatkan oleh kurang aktifnya komite sekolah sedangkan hambatan sumber daya manusia berupa kurang adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam hal pengelolaan dana BOS, sehingga diperlukan bimbingan teknis rutin dari Dinas terkait untuk meningkatkan kompetensi para pengelola dana BOS di tingkat sekolah. Dalam penelitiannya itu, (Pontoh et al., 2017) juga menyebutkan bahwa hambatan komunikasi mengakibatkan pihak sekolah tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi dan transparansi dalam mengelola dana BOS. Kendala birokrasi, mengakibatkan dana BOS sering terjadi keterlambatan penyaluran sehingga pihak sekolah harus terlebih dahulu mencari pendanaan lain

untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rumusan masalah komparatif. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pengelolaan dana BOS di SMKN 3 Tangerang Selatan dan SMK Assalam Jayanti Kota Tangerang. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan triangulasi yang menggabungkan metode wawancara bersama observasi.

Triangulasi dilakukan untuk mendapatkan data primer berupa informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS di kedua objek penelitian. Dalam konteks ini, selain untuk mengumpulkan data, triangulasi itu sendiri merupakan bagian dari upaya menguji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif (Sugiono, 2014). Adapun dokumentasi, dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa besaran dana BOS yang diterima serta data-data dalam laporan pengelolaan dana BOS lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model Milles dan Huberman yang terdiri dari proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Hakim & Rosini, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sampel yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

a. Pengelolaan Dana BOS di SMK Assalam Jayanti Tangerang

Pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh SMK Assalam Jayanti meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam proses perencanaan,

terdapat 2 kegiatan utama yaitu penyusunan RKAS dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana BOS yang dilakukan secara bersamaan.

Penyusunan RKAS diawali dengan menginventarisir kebutuhan sekolah berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Proses penyusunannya sendiri melibatkan tim anggaran yang terdiri dari Kepsek, para Wakasek, dan Kepala Bagian Tata Usaha. Tim anggaran inilah yang akan menyusun RKAS. Setelah RKAS tersusun, selanjutnya disosialisasikan kepada komite sekolah untuk meminta pandangan mengenai setiap item kegiatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan.

Komite sekolah diminta untuk menyetujui draft RKAS yang telah tersusun untuk selanjutnya disosialisasikan kepada guru, karyawan, dan orangtua siswa melalui rapat pleno komite sekolah. Dalam hal ini, komponen-komponen yang terdapat pada RKAS SMK Assalam Jayanti terdiri dari 2 sumber dana yaitu dari masyarakat dan pemerintah. Dana dari masyarakat berupa sumbangan orangtua siswa, hasil usaha sekolah, serta dana-dana sah lainnya. Adapun dana dari pemerintah, berupa dana BOS serta dana hibah dari pemerintah daerah apabila ada kebijakannya. Dana BOS dalam RKAS tersebut hanya diperuntukan bagi kegiatan operasional sekolah non personalia.

Proses penyusunan RAB BOS dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan RKAS. Besaran dana BOS yang telah diketahui kisarannya berdasarkan jumlah siswa kemudian dibuatkan anggaran penggunaannya sesuai dengan Juknis BOS tahun 2018. Tetapi sebelumnya, data jumlah siswa harus valid dan diupload melalui sistem BOS. Setiap

item dalam penyusunan RAB BOS ini diupayakan tidak ada yang meleset dari Juknis. RAB BOS yang telah tersusun akan diajukan untuk proses pencairannya. Pengajuan dilakukan kepada pemerintah. Namun demikian, dana BOS tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Atas dasar itu, pihak sekolah menerapkan kebijakan dana operasional pendidikan (DOP) bagi para orangtua siswa. Besaran dana DOP yang disumbangkan tersebut disesuaikan dengan kondisi ekonomi orangtua siswa itu sendiri.

Atas dasar itu, pihak sekolah menginventarisir data kondisi ekonomi orangtua siswa melalui guru Bimbingan dan Konseling (BK). Dilakukan subsidi silang dana BOS, bahwa siswa yang kondisi orangtuanya kurang mampu tidak dibebani DOP, dimana iuran DOP hanya diberlakukan bagi orangtua siswa yang dinilai memiliki kondisi ekonomi yang baik saja. Pencairan dana BOS dilakukan per-triwulan. Dananya langsung masuk ke rekening sekolah yang apabila hendak diambil, maka perlu dilakukan oleh Kepsek dan Bendahara dengan menunjukkan kartu identitas. Pengambilan dananya juga tidak sekaligus, melainkan hanya diambil sesuai dengan kebutuhan pembiayaan terdekat.

Besaran dana BOS yang diterima pada tahun 2018 misalnya, adalah sebesar 116.200.000 karena jumlah siswa yang relatif tidak banyak. Dana ini didapatkan dari pencairan triwulan pertama sebesar 23.000.000, triwulan kedua 47.000.000, triwulan ketiga 29.000.000, dan triwulan terakhir 17.200.000. Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan RAB BOS yang telah disusun. Namun demikian, SMK Assalam Jayanti terkadang tidak

menggunakan dana BOS sesuai RAB, sehingga harus mengajukan RAB BOS perubahan yang terlebih dahulu harus disetujui oleh pihak Dinas Pendidikan setempat.

Kemudian, pihak yang berhak membelanjakan dana BOS ini adalah tim pembelanjaan yang dibentuk oleh sekolah untuk belanja barang atau jasa. Tim belanja ini dipimpin oleh Wakasek bidang Sapras (Sarana dan Prasarana) serta pegawai tata usaha pada bidang inventaris. Pembelanjaan dilakukan dengan hati-hati, teknisnya adalah dengan terlebih dahulu melakukan negoisasi harga dengan pihak penjual untuk mendapatkan kualitas terbaik dengan harga terendah. Negoisasi atau tawar menawar ini juga membahas tentang ketentuan pembayaran pajaknya karena sekolah memerlukan bukti setoran pajak atas barang yang dibeli. Pertimbangan lain yang digunakan adalah dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien sehingga dalam setiap pembelanjaan, sekolah berupaya untuk survei harga pasar terlebih dahulu.

Setiap belanja pengeluaran dana BOS dibukukan. Pembukuan ini dilakukan setiap bulan oleh bendahara BOS untuk dilaporkan kepada Kepsek. Pembukuan dana BOS dilakukan secara terpisah dengan pembukuan penggunaan anggaran yang berasal dari sumber lain. Sehingga pembukuan dana BOS ini dilakukan secara khusus melalui instrumen buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Bendahara melakukan pembukuan berdasarkan bukti transaksi dari tim belanja.

Hasil pembukuan akan menjadi dasar untuk pelaporan dana BOS. Dalam hal ini, bentuk laporannya adalah laporan

pengelolaan dana BOS yang diberikan kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Laporan untuk pemerintah daerah diberikan kepada Dinas Pendidikan Pemkot Tangerang, sedangkan laporan untuk pemerintah provinsi dan pusat dilakukan dengan mengirimkan email. Selain kepada pemerintah, laporan pengelolaan dana BOS juga diberikan kepada komite sekolah. Laporan pengelolaan dana BOS ini selanjutnya dipublikasikan dalam papan pengumuman serta selebaran yang diberikan kepada para orangtua siswa dalam rapat. Terdapat 9 kelompok pembiayaan dalam RAB BOS yang diambil dari 8 standar nasional pendidikan serta belanja pegawai sebagai tambahannya. Kelompok pembiayaan tersebut antara lain untuk pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengembangan standar pengelolaan, pembiayaan, sistem penilaian, dan belanja pegawai. Dari 9 kelompok pembiayaan ini, pengembangan sarana dan prasarana mendapatkan proporsi yang tertinggi.

b. Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tangerang Selatan

Mekanisme dan proses penyaluran dana BOS di SMKN 3 Tangsel menggunakan 6 langkah. Dimulai dari pengisian formulir peserta didik, *update* data ke dalam data pokok peserta didik, verifikasi data oleh tim BOS Kabupaten/Kota, pengecekan data sekolah, pencairan dana ke rekening sekolah, hingga penggunaan dana BOS oleh sekolah.

Pengisian format nama peserta didik calon penerima hingga proses-proses

lainnya telah dilakukan secara online. Setelah semua berkas diunggah dan syarat-syarat lainnya dilengkapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah yang akan menerima dana BOS. Proses verifikasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol untuk meminimalisir terjadinya kesalahan data maupun kemungkinan adanya manipulasi data oleh pihak sekolah. Setelah diverifikasi dan hasilnya benar-benar valid, maka dana BOS akan disalurkan melalui bank penyalur dari pemerintah pusat untuk kemudian ditransfer ke rekening sekolah.

Pada tahun 2017 misalnya, SMKN 3 Tangsel mendapatkan dana BOS sebesar 1.125.600.000 rupiah. Jumlah ini tidak dicairkan sekaligus, melainkan dibagi menjadi 4 termin yang dihitung setiap triwulan. Proses pengambilannya menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh Kepsek dan Bendahara dengan menunjukkan kartu identitas. Setelah dana dicairkan selanjutnya SMKN 3 Tangsel membelanjakan kebutuhan operasional sekolah yang sudah tercantum dalam RAB BOS. Diantara item pembelanjaan adalah untuk pengadaan buku kurtilas. Prosesnya adalah dengan pemesanan online melalui aplikasi pada laman yang disediakan Kemendikbud. SMKN 3 Tangsel juga membeli barang dan jasa lainnya dengan menggunakan *e-katalog* dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Namun, apabila barang atau jasa yang dibutuhkan ternyata belum ada dalam *e-katalog*, SMKN 3 Tangsel melakukan belanja secara langsung dengan terlebih dahulu membandingkan harga untuk

mendapatkan barang atau jasa dengan harga terendah namun dengan kualitasnya sesuai spesifikasi. Pada tahun anggaran 2017, dana BOS yang digunakan SMKN 3 Tangsel untuk pengadaan barang hanya berupa buku dan printer. Sisanya, digunakan untuk kegiatan operasional sekolah. Pada proses ini, pihak sekolah berupaya untuk melakukan transparansi dalam setiap pembelanjannya meskipun belum ada tim belanja khusus di sekolah ini, pembelian dilakukan oleh tim manajemen BOS sekolah.

Apabila dirata-ratakan, setiap siswa mendapatkan dana BOS sebesar 1.400.000 rupiah per-tahun. Tetapi, nominal ini tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Alhasil, dana yang digunakan untuk menutupi kekurangan dana BOS ini diambil dari dana komite sekolah. Setiap bulannya, tim manajemen BOS dari Dinas terkait melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakukan sekolah. Di samping itu, jika terjadi permasalahan, dilakukan audit oleh tim dari pemerintah daerah. Namun selama ini, belum pernah terjadi permasalahan dana BOS di SMKN 3 Tangsel, yang ada hanya kesalahan-kesalahan kecil yang dianggap tidak signifikan. Hasil dari pengawasan dana BOS di SMKN 3 Tangsel menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS nya sudah sesuai dengan Juknis BOS 2017.

Adapun dalam proses pelaporan dana BOS, pihak sekolah mendokumentasikan seluruh transaksi keuangan dana BOS dalam buku kas umum, buku kas bank, buku pembantu pajak, cash opname dan berita acara pemeriksaan kas, serta bukti pengeluaran. Bentuk laporannya adalah dokumen realisasi penggunaan dana dari setiap sumber dana, rekapitulasi realisasi

penggunaan BOS, pencatatan pelayanan, dan penanganan pengaduan masyarakat, dan laporan aset. Seluruh laporan tersebut disusun dalam laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS setiap triwulan lalu diserahkan ke Dinas Pendidikan, serta laporan secara online ke laman BOS.

Prinsip akuntabilitas yang diterapkan pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS ini adalah dengan menempelkan rekapitulasi penggunaan dana BOS di papan pengumuman. Di samping itu, ada juga selebaran yang diberikan kepada para orangtua siswa melalui rapat pleno komite sekolah. Sementara terkait dengan perpajakan dana BOS, pihak sekolah dikenakan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPn pasal 22, dan pelunasan bea materai.

PEMBAHASAN

a. Evaluasi Pengelolaan Dana BOS SMK Assalam Jayanti Kota Tangerang

Pengelolaan dana BOS SMK Assalam Jayanti cenderung sudah terarah yang dalam hal ini mengacu pada Juknis BOS. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan kekurangan yang masih ditemukan. Diantaranya adalah dari aspek penyusunan RKAS dan RAB BOS yang terkesan belum dilakukan melalui kajian yang tepat. Terbukti, SMK Assalam Jayanti masih melakukan perubahan RAB BOS karena pembelian dana BOS yang tidak sesuai dengan rencana awal.

Hal lain yang juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana BOS di SMK Assalam Jayanti adalah dari segi pendataan siswa untuk pengajuan anggaran BOS. Masih terjadi perbedaan antara data yang diajukan dengan jumlah realisasinya. Alasannya adalah karena masih ada siswa yang berhenti di tengah

jalan. Dari aspek pengawasan dan evaluasi, SMK Assalam Jayanti relatif lebih 'longgar'. Baik itu pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah maupun oleh Dinas terkait. Alasannya adalah karena nominal dana BOS yang didapatkan cenderung masih kecil serta keterbatasan akses komunikasi antara sekolah dengan Dinas terkait.

Dari aspek pelaporan, setiap transaksi beserta buktinya sudah lengkap meskipun relatif lebih sederhana dan tidak terlalu banyak item pembelanjannya. Hal ini karena dana BOS yang diterimanya juga tidak besar. Atas dasar itu, penyelesaian laporannya dapat lebih cepat. Kondisi SMK Assalam Jayanti apabila dilihat dari segi sarana dan prasarana memang hingga saat ini tergolong sangat sederhana. Namun tekad sekolah yang kuat membuatnya terus berbenah. Di tengah keterbatasan, sekolah ini dapat menghasilkan dampak yang besar bagi kemajuan pendidikan di daerahnya.

b. Evaluasi Pengelolaan Dana BOS SMKN 3 Kota Tangerang Selatan

Pengelolaan dana BOS yang dilakukan SMKN 3 Tangsel relatif sudah sesuai dengan Juknis BOS tahun 2017. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Sementara dari aspek pengawasan internal, cenderung belum maksimal meskipun sudah dilakukan sesuai prosedur yaitu melalui komite sekolah dan tim manajemen BOS.

Penggunaan Dana BOS yang dijelaskan telah disesuaikan dengan hasil rapat yang sudah disusun dalam rencana anggaran belanja. Perencanaan yang kurang lengkap ataupun terdapat kesalahan, maka sekolah berhak untuk

membuat perencanaan anggaran perubahan yang kemudian dikonfirmasi kepada Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penggunaan dana secara riil yang dilakukan oleh sekolah yaitu secara bersama dengan dengan dana yang berasal dari komite/masyarakat, namun untuk Dana BOS hanya dikhususkan membiayai kegiatan operasional sekolah non-personalia.

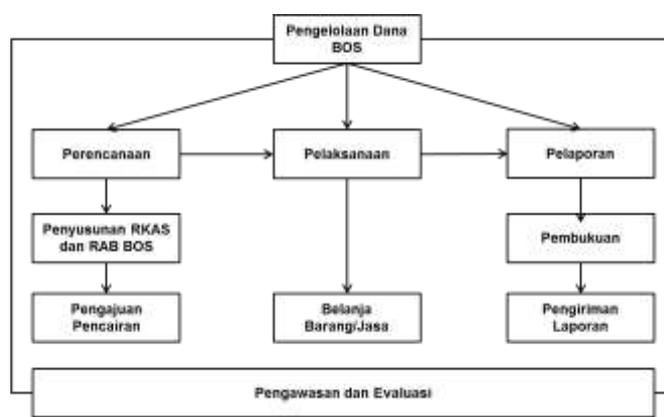
Jumlah Dana BOS yang diterima oleh SMK Negeri 3 Kota Tangsel termasuk dana yang cukup besar, namun apabila dibandingkan dengan penggunaan sekolah untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sekolah dana tersebut masih dalam kategori cukup. Sekolah masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kualitas. Sekolah juga membutuhkan dana yang berasal dari wali siswa berupa SPP untuk memenuhi kegiatan operasional sekolah selain yang dapat didanai dengan Dana BOS. SPP yang dibayarkan oleh wali siswa setiap bulannya, terdapat perbedaan jumlah dana antara siswa yang satu dengan yang lain. Penyebab perbedaan ini dikarenakan penerapan subsidi silang dan adanya bantuan dari Dana BOS.

Pelaksanaan kegiatan pembelian barang/jasa yang dibiayai dengan dana BOS terdapat prosedur dan pertimbangan tersendiri. Pelaksanaan tersebut tidak diatur dalam petunjuk teknis BOS. Pembelian barang/jasa memiliki mekanisme tersendiri yaitu dengan membeli barang yang paling dibutuhkan dengan segera oleh sekolah. Selain itu juga diterapkan prinsip efektif dan efisien. Efektif yang dimaksud ini adalah barang yang dibeli memang memiliki manfaat

yang besar untuk kegiatan sekolah terutama untuk kebutuhan siswa. Prinsip kedua efisien, yaitu penggunaan dana terhadap pembelian barang tersebut dengan harga yang minimal, namun apabila dana yang tersedia masih cukup untuk mendapatkan barang/jasa dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang tinggi maka akan dipertimbangkan untuk dilakukan pembelian.

c. Analisis Komparatif Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS SMK Assalam Jayanti Tangerang dan SMKN 3 Tangsel

Pengelolaan dana BOS baik itu yang dilaksanakan oleh SMK Assalam Jayanti dengan SMKN 3 Tangsel sama-sama mengacu pada Juknis BOS. Berikut gambaran umum proses pengelolaan dana BOS yang dilakukan SMK Assalam Jayanti maupun SMKN 3 Tangsel :



Gambar 1. Pola Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan gambar di atas, meskipun terlihat cukup sederhana namun terdapat beberapa teknis yang terkendala. Di samping itu, terdapat beberapa perbedaan teknis dalam pengelolaan dana BOS di SMK Assalam Jayanti dengan di SMKN 3 Tangsel. Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal teknis penyusunan RKAS dan RAB BOS, pembelanjaan, pengawasan, pelaporan, serta pencarian dana untuk menutupi kekurangan anggaran dana BOS.

Dalam hal penyusunan RKAS dan RAB BOS, SMKN 3 Tangsel cenderung lebih detail dalam menganalisa kebutuhan-kebutuhan sekolah. Bukan berarti SMK Assalam Jayanti tidak demikian, tetapi pemahaman dalam penyusunan anggaran

relatif masih lebih baik yang dilakukan SMKN 3 Tangsel. Penyebabnya adalah karena SMKN 3 Tangsel memiliki akses yang lebih baik kepada Dinas terkait sehingga lebih matang dalam menyusun perencanaan.

Dari aspek pembelanjaan, SMKN 3 Tangsel juga cenderung lebih tertib karena telah sebagian besar telah menggunakan e-katalog. Sedangkan untuk aspek pengawasan, SMKN 3 Tangsel relatif lebih ketat pengawasannya, karena mengaktifkan pengawasan internal dan eksternal secara lebih intensif. Berbeda dengan SMK Assalam Jayanti yang terkesan 'kurang diperhatikan' Dinas terkait.

Dari segi pelaporan, item-item

pelaporan dana BOS yang dilakukan SMK Assalam Jayanti lebih sederhana dan cepat proses pelaporannya. Penyebabnya adalah karena adanya perbedaan nominal dana BOS yang cukup besar antara kedua sekolah ini. SMKN 3 Tangsel mendapatkan dana BOS yang jauh lebih besar dari SMK Assalam Jayanti sebagai konsekuensi dari jumlah siswa.

Sementara dari segi pencarian dana tambahan untuk menutupi kekurangan dana BOS, SMK Assalam Jayanti relatif lebih kreatif, karena meskipun kondisi bangunan sekolahnya sangat sederhana, tetapi SMK yang terletak di Jayanti ini sedang terus berbedah, sedikit-demi sedikit merenovasi maupun membangun ruang kelas baru. Kondisi ini menunjukkan adanya tekad yang kuat dari pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitasnya.

Kendala atau hambatan yang sama dihadapi SMKN 3 Kota Tangsel dengan SMK Assalam Jayanti yaitu keterlambatan pencairan dana BOS sehingga harus memakai uang komite untuk membeli kebutuhan operasional. Di samping itu, kekurangan dana BOS untuk memenuhi kebutuhan sekolah juga menjadi kendala yang dirasakan hingga saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa kesimpulan yang dapat dirangkum :

1. Pengelolaan dana BOS yang dilakukan SMK negeri seperti SMKN 3 Tangsel

cenderung lebih taat Juknis, tertib administrasi, memiliki SDM pengelolaan yang kompeten, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

2. Kendala-kendala umum yang masih dihadapi pihak sekolah yakni dari keterlambatan pencairan dana BOS, kelengkapan berkas dalam pembukuan, perbedaan antara perencanaan dan realisasi, hingga penentuan skala prioritas penggunaan anggaran yang relatif belum terencana dengan baik.
3. Sekolah swasta seperti SMK Assalam Jayanti memiliki tekad yang kuat untuk bertahan dengan mencari alternatif-alternatif pendanaan lain yang sah sebagai upaya menutupi kekurangan dana BOS.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana BOS yang dilakukan SMKN 3 Tangsel perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan kualitasnya.
2. SMK Assalam Jayanti diharapkan lebih matang kembali dalam menjalankan mekanisme pengelolaan BOS yang sesuai dengan Juknis, terutama dari aspek perencanaan anggarannya.
3. Pemerintah daerah terkait diharapkan lebih intensif dalam memberikan pendampingan serta pengawasan khususnya bagi sekolah swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, A. ; M. ; B. (2019). *Manajemen Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 7(1), 1–6.
- Hakim, D. R., & Rosini, I. (2018). *Metode Penulisan Ilmiah*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Hakim, D. R., & Suhendar, D. (2019). *DETERMINAN OPTIMALISASI KINERJA ORGANISASI DENGAN MODMED VARIABEL ANALISIS (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan)*. Bisnis Net, 2(2), 23–34.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu*. (1), 223–232.
- Salman, I., Warjio, & Isnaini. (2018). *Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar*. Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 18–38.
- Silele, E., & Sabijono, H. (2017). *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.
- Siswanto, S., & Sutrisna, B. (2014). *Pengelolaan BOS SMP Negeri 1 Simo Dalam Mekanisme APBD Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2011*. Jurnal Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Solikhatun, I. (2015). *ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL (BOS) (Studi pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)*. Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia, 5, 1–13.
- Sudrajat, A. (2010). *Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sekolah*. Retrieved from akhmadsudrajat.wordpress.com
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryo Pratolo. (2008). *Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 9(2), 108–124.